Journal of Innovative and Creativity
Journal Homepage: https://joecy.org/index.php/joecy
e-mail: journaljoecy@gmail.com

Faculty of Education
University of Pahlawan Tuanku Tambusai
ISSN 2775-771X (Online)
ISSN 2962-570X **(Printed)**
6 (2) 2026, Page: 29800-29810

Sejarah Politik Pendidikan Di Indonesia : Dinamika Kekuasaan Dari Kolonialisme Hingga Era Reformasi

M. Rio Saputra[1], Siti Lutfiyah[2], Endang Dinasty[3], Ilham Fotron Mustofa[4], Afriantoni[5]
[12345] Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang
Corresponding Author: M. Rio Saputra :e-mail , mhmdriosptra7@gmail.com

Published: June , 2026

ABSTRAK

Sejarah politik pendidikan di Indonesia menunjukkan hubungan yang erat antara kekuasaan dan arah penyelenggaraan pendidikan dalam setiap periode sejarah. Artikel ini bertujuan untuk mengkaji dinamika politik pendidikan Indonesia dari masa kolonial hingga era reformasi dengan menyoroti pergeseran fungsi, ideologi, dan kepentingan yang melatarbelakangi kebijakan pendidikan. Pada masa kolonial, sistem pendidikan dirancang secara diskriminatif untuk memenuhi kebutuhan administrasi penjajah sekaligus mempertahankan dominasi kekuasaan. Setelah kemerdekaan, pendidikan bertransformasi menjadi instrumen strategis dalam membangun identitas nasional dan memperkuat integrasi bangsa. Pada periode orde lama, pendidikan dipengaruhi oleh orientasi ideologis negara yang menempatkan pendidikan sebagai alat perjuangan revolusi. Sementara itu, pada masa orde baru, kebijakan pendidikan cenderung bersifat sentralistik dengan penekanan pada stabilitas nasional dan pembangunan, namun seringkali mengabaikan aspek kritis dan kebebasan berpikir. Memasuki era reformasi, terjadi perubahan signifikan melalui desentralisasi dan demokratisasi pendidikan, meskipun implementasinya masih menghadapi berbagai persoalan seperti ketimpangan akses, kualitas pendidikan, dan tarik-menarik kepentingan politik di tingkat lokal. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi literatur dan analisis historis untuk memahami keterkaitan antara kekuasaan politik dan kebijakan pendidikan. Hasil kajian menegaskan bahwa pendidikan di Indonesia selalu berada dalam ruang tarik-menarik kepentingan politik, sehingga diperlukan kebijakan yang lebih independen, inklusif, dan berorientasi pada pembangunan manusia seutuhnya. Hasil analisis menunjukkan bahwa pendidikan di Indonesia selalu terpengaruh oleh kekuasaan sepanjang waktu. Dari zaman kolonial sampai masa reformasi, pendidikan dimanfaatkan sebagai sarana untuk kepentingan negara, baik untuk pengendalian, penyebaran ideologi, maupun menuju sistem yang lebih demokratis. Ini menegaskan bahwa pendidikan tidak netral dan mempengaruhi kualitas serta distribusinya. Kesimpulan dari pembahasan ini mengungkapkan bahwa kebijakan pendidikan di Indonesia selalu terpengaruh oleh kekuasaan dan kepentingan negara pada setiap masa, mulai dari era kolonial, orde lama, orde baru, hingga masa reformasi. Pendidikan dimanfaatkan sebagai sarana untuk mendukung tujuan politik, baik melalui kontrol, penyebaran ideologi, maupun usaha untuk mewujudkan sistem yang lebih adil dan demokratis. Ini menegaskan bahwa pendidikan tidak pernah bersifat netral, melainkan memiliki peranan yang signifikan dalam menentukan arah pembangunan serta kualitas dan distribusi pendidikan di masyarakat.

Kata kunci: Sejarah Pendidikan, Politik , Kekuasaan, Kolonialisme, Reformasi.

© The Author(s). 2021 Open Access This article is licensed under a Creative Commons Atibution 4.0 International License, which permits use, sharing, adaptation, distribution and reproduction in any medium or format, as long as you give appropriate credit to the original author(s) and the source, provide a link to the Creative Commons licence, and indicate if changes were made. The images or other third party material in this article are included in the article's Creative Commons licence, unless indicated otherwise in a credit line to the material. To view a copy of this licence, visit http://creativecommons.org/licenses/by/4.0

PENDAHULUAN

Pendidikan merupakan salah satu instrumen paling strategis dalam membentuk arah perkembangan suatu bangsa. Di Indonesia, perjalanan pendidikan tidak dapat dipisahkan dari dinamika kekuasaan politik yang melingkupinya. Sejak masa kolonial hingga era reformasi, kebijakan dan praktik pendidikan senantiasa dipengaruhi oleh kepentingan politik, ideologi, serta orientasi kekuasaan yang sedang dominan. Hal ini menunjukkan bahwa pendidikan bukan sekadar proses transfer ilmu pengetahuan, tetapi juga menjadi arena kontestasi kepentingan yang mencerminkan relasi antara negara, masyarakat, dan kekuasaan (Rosyada, 2017).

Pada masa kolonial, sistem pendidikan di Indonesia dirancang untuk melayani kepentingan penjajah. Pendidikan tidak diberikan secara merata, melainkan bersifat diskriminatif berdasarkan ras dan status sosial.

Tujuan utamanya adalah menciptakan tenaga kerja yang terampil namun tetap berada dalam posisi subordinat, sehingga mampu mendukung administrasi kolonial tanpa mengancam kekuasaan penjajah. Dengan demikian, pendidikan pada periode ini berfungsi sebagai alat legitimasi dan reproduksi kekuasaan kolonial (Idris & Tolla, 2024).

Setelah Indonesia merdeka, pendidikan mengalami transformasi yang signifikan. Pemerintah menjadikan pendidikan sebagai sarana untuk membangun identitas nasional, menanamkan nilai-nilai kebangsaan, serta memperkuat persatuan di tengah keberagaman. Namun, dalam praktiknya, arah pendidikan tetap dipengaruhi oleh dinamika politik yang berkembang. Pada masa Orde Lama, misalnya, pendidikan sarat dengan muatan ideologis yang menempatkannya sebagai alat perjuangan revolusi. Kurikulum dan kebijakan pendidikan diarahkan untuk mendukung visi politik negara, sehingga aspek kritis dan objektivitas ilmiah seringkali terpinggirkan (anisa Al Maulani & Khasanah, 2025).

Memasuki masa Orde Baru, terjadi perubahan orientasi dalam politik pendidikan. Pemerintah menerapkan sistem yang lebih sentralistik dengan kontrol yang kuat terhadap kurikulum, tenaga pendidik, dan institusi pendidikan. Pendidikan difokuskan pada pembangunan nasional dan stabilitas politik. Di satu sisi, kebijakan ini berhasil meningkatkan akses pendidikan dan memperluas infrastruktur pendidikan. Namun, di sisi lain, pendekatan yang terlalu terpusat cenderung membatasi kebebasan berpikir, kreativitas, dan partisipasi masyarakat dalam proses pendidikan (Alam, 2020).

Era reformasi membawa angin perubahan yang cukup signifikan dalam sistem pendidikan di Indonesia. Desentralisasi dan otonomi daerah menjadi ciri utama dalam pengelolaan pendidikan, yang diharapkan mampu meningkatkan partisipasi masyarakat serta menyesuaikan kebijakan pendidikan dengan kebutuhan lokal. Selain itu, demokratisasi pendidikan mendorong munculnya berbagai inovasi dan kebebasan akademik yang lebih luas. Meskipun demikian, implementasi kebijakan ini masih menghadapi berbagai tantangan, seperti ketimpangan kualitas pendidikan antar daerah, keterbatasan sumber daya, serta masih kuatnya intervensi kepentingan politik di tingkat lokal (Ridwan & Sumirat, 2021).

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa sejarah politik pendidikan di Indonesia merupakan proses panjang yang sarat dengan dinamika kekuasaan. Setiap periode sejarah menunjukkan bagaimana pendidikan digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan politik tertentu, baik dalam konteks kolonialisme, pembangunan nasional, maupun demokratisasi. Oleh karena itu, kajian mengenai sejarah politik pendidikan menjadi penting untuk memahami bagaimana kebijakan pendidikan terbentuk, serta bagaimana pengaruh kekuasaan dapat membentuk arah dan tujuan pendidikan di Indonesia.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode *library research* (studi pustaka) yang berfokus pada pengkajian sumber-sumber tertulis untuk menganalisis sejarah politik pendidikan di Indonesia dalam dinamika kekuasaan dari masa kolonial hingga era reformasi. Data penelitian diperoleh dari berbagai literatur yang relevan, seperti buku sejarah pendidikan, jurnal ilmiah, artikel akademik, serta dokumen resmi berupa kebijakan pendidikan (misalnya undang-undang dan kurikulum) yang berlaku pada setiap periode, khususnya masa kolonial, Orde Lama, dan Orde Baru.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi dengan cara membaca secara kritis, mencatat, serta mengklasifikasikan informasi berdasarkan periode kekuasaan dan karakter kebijakan pendidikannya. Analisis data menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, yaitu dengan menafsirkan isi literatur, membandingkan antar sumber, serta mengaitkan kebijakan pendidikan dengan konteks politik yang melatarbelakanginya. Fokus analisis diarahkan pada bagaimana pendidikan digunakan sebagai instrumen kekuasaan baik sebagai alat kontrol sosial dan penyebaran ideologi pada masa kolonial dan Orde Baru, maupun sebagai sarana pembentukan identitas nasional pada masa Orde Lama.

Dengan metode ini, penelitian bertujuan untuk memberikan pemahaman yang sistematis dan mendalam mengenai hubungan erat antara pendidikan dan kekuasaan, serta menunjukkan bahwa perubahan kebijakan pendidikan di Indonesia tidak dapat dipisahkan dari dinamika politik yang terjadi pada setiap periode sejarah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konseptual Politik Pendidikan

Politik pendidikan adalah konsep yang berhubungan dengan cara pengambilan keputusan, pengembangan kebijakan, dan pelaksanaan sistem pendidikan yang dipengaruhi oleh kepentingan politik, sosial, ekonomi, dan budaya suatu negara. Secara umum, politik pendidikan tidak hanya mengupas tentang aspek pendidikan itu sendiri, tetapi juga mengkaji peran kekuasaan dalam menentukan arah, tujuan, dan materi pendidikan. Dalam penelitian terbaru, politik pendidikan dimaknai sebagai proses distribusi kekuasaan dalam ranah pendidikan, termasuk dalam penentuan kurikulum, manajemen institusi pendidikan, serta pembagian sumber daya pendidikan. Oleh karena itu, pendidikan tidak beroperasi sebagai sistem yang netral, tetapi selalu terkait dengan kepentingan dan kebijakan negara (Solichin, 2015).

Hubungan antara pendidikan dan kekuasaan sangat saling terkait dan tidak bisa dipisahkan. Pendidikan sering digunakan oleh mereka yang berkuasa untuk menjaga dan menguatkan kekuasaannya. Dari sudut pandang teori sosial, pendidikan bisa berperan sebagai cara untuk memperkuat kekuasaan, di mana nilai-nilai, ideologi, dan kepentingan kelompok yang berkuasa disebarluaskan kepada masyarakat lewat sistem pendidikan. Namun, di sisi lain, pendidikan juga memiliki kapasitas sebagai alat pembebasan yang bisa membentuk kesadaran kritis masyarakat untuk memahami dan bahkan menilai ulang kekuasaan. Dengan demikian, hubungan antara pendidikan dan kekuasaan bersifat saling memengaruhi, sebagai alat dominasi sekaligus alat emansipasi (Addina & Hanif, 2025).

Peran pemerintah dalam kebijakan pendidikan sangatlah krusial karena pemerintah menjadi tokoh utama dalam merancang, mengelola, dan menerapkan sistem pendidikan. Pemerintah memiliki hak untuk menentukan kurikulum, standar pendidikan, serta pembagian anggaran dan sarana pendidikan. Selain itu, pemerintah juga bertanggung jawab untuk memastikan bahwa pendidikan dapat diakses secara adil dan merata oleh seluruh lapisan masyarakat. Dalam praktiknya, kebijakan pendidikan yang dihasilkan oleh pemerintah sering kali mencerminkan kepentingan politik dan ideologi yang sedang berlaku. Oleh sebab itu, peran pemerintah tidak hanya sebagai pengelola pendidikan, tetapi juga sebagai pengarah utama dalam menetapkan tujuan dan arah pendidikan nasional (Famella et al., 2024).

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa politik pendidikan menunjukkan bahwa sistem pendidikan tidak pernah bersifat netral karena selalu dipengaruhi oleh kekuasaan serta kepentingan politik, sosial, ekonomi, dan budaya. Pendidikan memiliki hubungan timbal balik dengan kekuasaan: di satu sisi dapat dimanfaatkan sebagai alat untuk mempertahankan dan menyebarkan ideologi para penguasa, namun di sisi lain juga berpotensi menjadi sarana pembebasan yang dapat meningkatkan kesadaran kritis masyarakat. Dalam konteks ini, pemerintah memiliki peran yang sangat penting sebagai penentu arah kebijakan pendidikan, mulai dari kurikulum, standar, hingga distribusi sumber daya, sehingga kebijakan yang dihasilkan mencerminkan kepentingan dan ideologi yang berlaku serta berdampak besar terhadap mutu dan pemerataan pendidikan di masyarakat.

Politik Pendidikan Pada Masa Kolonial

Pada era kolonial, terutama di bawah pengaruh Belanda, sistem pendidikan di Indonesia sengaja diarahkan untuk mendukung kepentingan pemerintah penjajah, bukan untuk memajukan pemahaman masyarakat lokal secara menyeluruh. Sasaran utama pendidikan pada masa itu adalah untuk menghasilkan tenaga kerja terampil yang tetap berada pada posisi yang rendah dan tunduk pada kekuasaan penjajah. Proses pendidikan lebih menekankan pada kebutuhan administratif, seperti menyiapkan pegawai dengan keterampilan dasar guna mendukung berjalan lancarnya birokrasi kolonial. Oleh karena itu, materi pendidikan yang diajarkan sangat terbatas dan tidak memungkinkan siswa untuk mengembangkan pemikiran yang kritis. Dalam penelitian terbaru, pendidikan pada masa kolonial dilihat sebagai bagian dari taktik politik kekuasaan yang bertujuan untuk mempertahankan kontrol dengan mengatur akses terhadap pengetahuan (Ali, 2017).

Sistem pendidikan yang ada di era kolonial juga memiliki sifat yang diskriminatif dan tersegmentasi. Pemerintah kolonial membedakan tipe sekolah menurut ras dan kelas sosial, seperti *Europeesche Lagere School* (ELS) untuk anak-anak Eropa, *Hollandsch-Inlandsche School* (HIS) bagi pribumi dari golongan tertentu, dan sekolah desa untuk masyarakat pribumi yang biasa. Perbedaan ini tampak tidak hanya dalam hal akses pendidikan, tetapi juga dalam hal mutu pengajaran, fasilitas, dan kurikulum yang tersedia. Mayoritas masyarakat pribumi umumnya hanya mendapatkan pendidikan dasar dengan kualitas yang terbatas,

sehingga menyulitkan mereka untuk memperbaiki kondisi hidup. Sistem ini, pada gilirannya, secara tidak langsung memperkuat ketimpangan struktur sosial dan menjaga dominasi kelompok penjajah terhadap masyarakat lokal (Sultani & Kristanti, 2020).

Selain memiliki sifat diskriminatif, pendidikan di era kolonial juga dimanfaatkan sebagai instrumen kekuasaan dan pengendalian sosial. Pemerintah kolonial menggunakan pendidikan untuk menanamkan nilai-nilai yang mendukung dominasi mereka, seperti ketaatan, disiplin, dan penerimaan terhadap sistem yang berlaku. Kurikulum disusun dengan cermat agar tidak menimbulkan perlawanan atau kesadaran kritis terhadap penjajahan. Dalam konteks ini, pendidikan berfungsi sebagai sarana ideologis yang menguatkan legitimasi kekuasaan kolonial. Ini menunjukkan bahwa pendidikan pada masa itu tidak bersifat netral, melainkan menjadi bagian dari strategi politik untuk mempertahankan stabilitas dan kelangsungan kekuasaan penjajah. Namun, di balik segala keterbatasan dan ketidakadilan yang ada, sistem pendidikan kolonial justru berperan dalam meningkatkan kesadaran nasional di masyarakat Indonesia. Segelintir orang pribumi yang mendapatkan akses pendidikan mulai menyadari adanya ketidakadilan dan penindasan yang dilakukan oleh pemerintah kolonial. Dari kelompok terdidik ini, muncul beberapa tokoh gerakan nasional yang berjuang untuk kemerdekaan, seperti Ki Hajar Dewantara yang mendirikan Taman Siswa sebagai cara menentang sistem pendidikan kolonial, serta Soetomo yang aktif dalam organisasi perjuangan nasional. Pendidikan berfungsi sebagai alat penting dalam menumbuhkan kesadaran kolektif tentang identitas bangsa dan nilai kemerdekaan (Fauzi et al., 2024).

Selanjutnya, munculnya organisasi-organisasi seperti Budi Utomo juga tidak terlepas dari pengaruh pendidikan kolonial. Organisasi ini menjadi tempat bagi para intelektual untuk menyampaikan aspirasi dan memperjuangkan hak-hak masyarakat lokal. Pendidikan memperluas pandangan masyarakat mengenai situasi global dan memotivasi semangat perlawanan terhadap penjajahan. Oleh karena itu, meskipun pada awalnya pendidikan dibuat untuk mempertahankan kekuasaan kolonial, dalam praktiknya pendidikan justru menjadi sarana penting dalam melahirkan gerakan nasionalisme di Indonesia.

Secara umum, kebijakan pendidikan selama masa kolonial menunjukkan bahwa pendidikan berfungsi sangat penting dalam aspek sosial dan politik. Pendidikan digunakan sebagai sarana untuk menjaga kontrol dan menciptakan ketidakadilan sosial, namun di sisi lain juga menjadi pendorong timbulnya kesadaran nasional serta perjuangan untuk meraih kemerdekaan. Ini membuktikan bahwa pendidikan tidak pernah benar-benar bebas dari bias, melainkan selalu dipengaruhi oleh kepentingan dan kekuasaan yang berlaku pada periode tersebut (Rasyid & Fahmi, 2025).

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pendidikan pada masa kolonial di Indonesia tidak dirancang untuk mendidik masyarakat secara menyeluruh, tetapi lebih untuk memenuhi kepentingan penguasa penjajah dengan menyediakan tenaga kerja yang terampil, namun dalam posisi yang terbatas dan patuh. Sistem pendidikan yang ada bersifat diskriminatif serta terpisah berdasarkan ras dan kelas sosial, memperkuat ketidakadilan dan mempertahankan dominasi kolonial. Selain itu, pendidikan digunakan sebagai sarana pengendalian sosial dan ideologi untuk menyebarkan nilai-nilai yang mendukung kekuasaan penjajah dan membatasi pemikiran kritis. Namun, di balik maksud tersebut, pendidikan sebenarnya juga memunculkan kesadaran nasional di kalangan kaum terdidik lokal, yang kemudian menjadi penggerak kehadiran tokoh dan organisasi pergerakan nasional, sehingga pendidikan memiliki peran ganda sebagai instrumen penindasan serta pemicu usaha menuju kemerdekaan.

Politik Pendidikan Pada Masa Orde Lama

Masa Orde Lama (1945–1966) adalah periode krusial dalam sejarah pendidikan di Indonesia, karena pada waktu ini sistem pendidikan mulai dikembangkan setelah negara merdeka. Pendidikan bukan hanya berfungsi untuk proses belajar, tetapi juga menjadi instrumen penting bagi negara dalam membangun bangsa. Setelah Indonesia meraih kemerdekaan, arah pendidikan berubah drastis dari sistem kolonial yang sebelumnya berfokus pada kepentingan penjajah menjadi sistem nasional yang berlandaskan pada Pancasila dan UUD 1945. Pemerintah mulai mengeluarkan kebijakan pendidikan, seperti Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1950, yang kemudian disempurnakan dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1954. Selain itu, bahasa Indonesia mulai menjadi bahasa pengantar dalam dunia pendidikan, dan akses terhadap pendidikan diperluas agar bisa dinikmati oleh seluruh warga negara. Pada periode ini, pendidikan juga berperan signifikan sebagai sarana untuk pembentukan identitas nasional. Sebagai bangsa yang baru saja merdeka dan kaya dengan berbagai budaya, Indonesia memerlukan alat untuk mempersatukan masyarakatnya. Pendidikan digunakan untuk menanamkan nilai-nilai cinta tanah

air, memperkuat ideologi Pancasila, serta membangun karakter generasi yang mencintai tanah air dan siap mempertahankan kemerdekaan. Melalui kurikulum dan proses belajar, siswa diajarkan sejarah perjuangan bangsa serta arti penting persatuan dan kesatuan. Dengan demikian, pendidikan tidak hanya fokus pada aspek akademis, melainkan juga memperhatikan pengembangan karakter dan kesadaran berbangsa (Khairudin & Jayanti, 2026).

Namun, dalam perkembangan selanjutnya, terutama pada masa Demokrasi Terpimpin (1959–1966), pendidikan mulai kuat dipengaruhi oleh ideologi politik. Pemerintah menjadikan pendidikan sebagai alat untuk menyebarluaskan ideologi negara dan memperkuat kekuasaan yang ada. Konsep seperti Manipol USDEK dimasukkan ke dalam kurikulum, sehingga pendidikan bertransformasi menjadi proses indoktrinasi ideologi bagi para siswa. Sekolah tidak lagi sepenuhnya menjadi tempat yang netral, tetapi berubah menjadi sarana untuk membentuk kesadaran politik sesuai dengan arah dan kebijakan pemerintah. Ini menunjukkan bahwa pendidikan di masa Orde Lama sangat dipengaruhi oleh dinamika politik, sehingga tak bisa dipisahkan dari kepentingan kekuasaan.

Selain kebijakan yang formal dan pengaruh dari ideologi, perkembangan pendidikan di Masa Orde Lama juga diwarnai dengan berbagai tantangan nyata. Salah satunya adalah keterbatasan dalam fasilitas dan infrastruktur pendidikan. Setelah merdeka, Indonesia masih menghadapi kondisi ekonomi yang belum stabil, sehingga pembangunan sekolah, penyediaan buku, dan ketersediaan tenaga pengajar masih sangat kurang. Banyak daerah, terutama di wilayah pedesaan, belum memiliki akses pendidikan yang memadai. Hal ini menjadikan pemerataan pendidikan sebagai salah satu fokus utama, meskipun dalam pelaksanaannya belum sepenuhnya tercapai. Di sisi lain, sosok tokoh nasional seperti Soekarno juga berperan besar dalam menentukan arah kebijakan pendidikan. Soekarno menekankan pentingnya pendidikan sebagai sarana revolusi serta pembentukan manusia Indonesia yang bersifat nasionalis, berkarakter, dan anti-imperialis. Konsep "nation and character building" menjadi landasan dalam pengembangan pendidikan, yang tidak hanya bertujuan untuk mencerdaskan, tetapi juga membentuk mentalitas dan ideologi bangsa (Djuyandi, 2023).

Selain itu, bermunculan pula berbagai lembaga pendidikan yang berafiliasi dengan kelompok atau organisasi tertentu, baik yang berorientasi agama maupun yang memiliki ideologi politik. Hal ini menunjukkan bahwa pendidikan pada periode tersebut tidak sepenuhnya berada di bawah kontrol negara, melainkan juga dipengaruhi oleh berbagai kekuatan sosial dan politik. Akibatnya, terdapat keragaman orientasi pendidikan yang terkadang memperkuat polarisasi ideologi dalam masyarakat. Dari sisi kurikulum, pergeseran juga berlangsung secara fleksibel sejalan dengan kebijakan politik negara. Kurikulum tidak hanya mencakup pelajaran akademis, tetapi juga memiliki kandungan ideologis yang signifikan. Contohnya, pada periode Demokrasi Terpimpin, pendidikan diarahkan untuk mendukung gagasan revolusi yang diusung oleh pemerintah. Hal ini mengakibatkan materi pendidikan kerap berubah dan tidak konsisten, sehingga mempengaruhi mutu pembelajaran (Hidayat, 2018).

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pada periode Orde Lama (1945–1966), sektor pendidikan di Indonesia mengalami transformasi signifikan dari sistem kolonial ke sistem nasional yang berlandaskan Pancasila dan UUD 1945. Tujuannya tidak hanya untuk mencerdaskan masyarakat, tetapi juga untuk membentuk identitas dan karakter bangsa. Pendidikan memiliki peran yang krusial dalam menanamkan nilai-nilai nasionalisme, persatuan, dan semangat untuk mempertahankan kemerdekaan. Namun, dengan perubahan situasi politik, terutama selama era Demokrasi Terpimpin, pendidikan semakin terpengaruh oleh ideologi dan kepentingan politik, bahkan dijadikan alat indoktrinasi melalui kurikulum yang dipenuhi muatan politik. Di sisi lain, kurangnya fasilitas, guru, dan akses pendidikan menjadi tantangan besar dalam usaha pemerataan pendidikan. Selain itu, keterlibatan berbagai kelompok sosial dan politik di dunia pendidikan menambah keragaman sekaligus risiko terjadinya konflik ideologis, sehingga memperlihatkan bahwa pendidikan pada periode Orde Lama sangat terkait dengan dinamika politik dan masih belum sepenuhnya stabil dalam pelaksanaannya.

Politik Pendidikan Pada Masa Orde Baru

Pada era Orde Baru (1966–1998) di bawah kepemimpinan Soeharto, pendidikan di Indonesia dikelola dengan sangat terpusat oleh pemerintah. Kebijakan pendidikan yang terpusat menjadi ciri khas selama periode ini, di mana semua keputusan yang berhubungan dengan pendidikan termasuk kurikulum, metode pengajaran, dan sistem penilaian ditentukan oleh pemerintah pusat. Sekolah-sekolah di seluruh

Indonesia diwajibkan untuk mematuhi aturan yang sama tanpa banyak memperhatikan situasi dan kebutuhan daerah masing-masing. Tujuan utama dari sentralisasi ini adalah untuk menciptakan sistem pendidikan nasional yang seragam serta mempermudah pemerintah dalam mengawasi pendidikan. Namun, kebijakan ini juga mengakibatkan terbatasnya kreativitas guru dan kurangnya ruang untuk inovasi pendidikan di tingkat lokal. Selain itu, kurikulum pada era Orde Baru tidak hanya berperan sebagai panduan belajar, tetapi juga berfungsi sebagai sarana kontrol negara. Pemerintah memanfaatkan kurikulum untuk menanamkan nilai-nilai yang dianggap penting demi mempertahankan stabilitas negara. Pelajaran seperti Pendidikan Moral Pancasila (PMP) dan program penataran Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (P4) menjadi elemen penting dalam sistem pendidikan (Yuningsih, 2015).

Lewat bahan ajar tersebut, siswa diarahkan untuk memahami dan menerapkan nilai-nilai Pancasila sesuai dengan pandangan pemerintah. Konsekuensinya, pendidikan menjadi lebih bersifat satu arah dan kurang memberikan kesempatan kepada siswa untuk berpikir kritis atau mengungkapkan pendapat yang berbeda, akibat adanya kontrol yang ketat terhadap materi dan arah pendidikan. Selanjutnya, pendidikan pada masa Orde Baru dirancang untuk mendukung stabilitas politik dan pembangunan nasional. Pemerintah menjadikan pendidikan sebagai alat untuk menghasilkan sumber daya manusia yang siap mendukung program pembangunan, terutama dalam sektor ekonomi. Nilai-nilai seperti disiplin, kepatuhan, dan loyalitas terhadap negara sangat ditekankan dalam proses pendidikan. Sistem pendidikan juga diarahkan untuk menciptakan tenaga kerja yang terampil dan produktif sesuai dengan kebutuhan pembangunan. Di sisi lain, pendidikan juga dimanfaatkan sebagai alat untuk mempertahankan stabilitas politik dengan membatasi penyebaran ide-ide yang dianggap bertentangan dengan pemerintah. Ini menunjukkan bahwa pendidikan tidak hanya berfungsi sebagai tempat belajar, tetapi juga sebagai instrumen politik untuk menjaga kekuasaan (Duryat, 2022).

Kebijakan pendidikan yang homogen selama periode Orde Baru memberikan berbagai konsekuensi bagi masyarakat. Di satu sisi, standarisasi pendidikan berkontribusi dalam menciptakan kesetaraan kualitas pendidikan di berbagai wilayah dan meningkatkan akses pendidikan lewat program wajib belajar. Pemerintah berhasil memberikan lebih banyak kesempatan belajar bagi masyarakat, yang berdampak pada peningkatan angka partisipasi pendidikan. Akan tetapi, di sisi lainnya, kebijakan yang terlalu seragam menimbulkan masalah negatif, seperti kurangnya perhatian terhadap keberagaman budaya dan kebutuhan spesifik daerah. Selain itu, sistem pendidikan yang terlalu terpusat mengakibatkan terbatasnya kebebasan berpikir, sehingga siswa menjadi kurang terbiasa bersikap kritis dan kreatif. Dengan demikian, kebijakan pendidikan pada masa Orde Baru menunjukkan bahwa pendidikan sangat dipengaruhi oleh kepentingan stabilitas dan pembangunan, namun juga menghadapi masalah terkait kebebasan dan keberagaman (Prihatin et al., 2025).

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pada masa Orde Baru (1966–1998), sistem pendidikan di Indonesia diatur secara sangat terpusat dengan tujuan untuk menciptakan keseragaman, mendukung stabilitas politik, dan mendukung pembangunan nasional. Kurikulum tidak hanya berperan sebagai panduan untuk belajar, tetapi juga berfungsi sebagai alat bagi negara untuk menanamkan nilai-nilai ideologis seperti Pancasila melalui program PMP dan P4, sehingga proses pendidikan menjadi lebih satu arah dan membatasi kemampuan berpikir kritis siswa. Walaupun kebijakan ini berhasil meningkatkan akses serta pemerataan pendidikan melalui standarisasi dan program wajib belajar, efek negatif yang ditimbulkannya adalah berkurangnya kreativitas di kalangan guru, rendahnya inovasi, dan kurangnya perhatian terhadap berbagai keunikan daerah. Oleh karena itu, pendidikan pada masa Orde Baru mencerminkan kekuatan negara dalam mengontrol arah pendidikan, sembari menunjukkan adanya keseimbangan antara pencapaian dalam pembangunan dan keterbatasan dalam kebebasan berpikir.

Politik Pendidikan Pada Era Reformasi

Pada masa reformasi yang dimulai setelah kejatuhan rezim Soeharto pada tahun 1998, sistem pendidikan di Indonesia mengalami transformasi signifikan yang bertujuan untuk membangun sebuah sistem yang lebih adil, transparan, dan sesuai dengan kebutuhan rakyat (Tarigan, 2024). Proses perubahan ini tidak selalu berjalan lancar, karena terdapat berbagai rintangan dan masalah yang cukup kompleks (Lathifah et al., 2024).

1. Desentralisasi dan otonomi pendidikan.

Pada masa reformasi, pemerintah mengimplementasikan kebijakan desentralisasi melalui regulasi seperti Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 yang kemudian diubah menjadi Undang-Undang

Nomor 23 Tahun 2014. Tujuan dari kebijakan ini adalah untuk memberikan lebih banyak wewenang kepada pemerintah daerah dalam pengelolaan pendidikan. Idealnya, langkah ini dapat menyesuaikan pendidikan dengan kebutuhan lokal. Namun dalam pelaksanaannya, muncul permasalahan seperti perbedaan kualitas pendidikan antar daerah, karena tidak semua wilayah memiliki sumber daya (seperti guru, fasilitas, dan anggaran) yang setara. Sebagai akibatnya, kualitas pendidikan di perkotaan dan wilayah terpencil dapat sangat berbeda.

2. Demokratisasi dalam kebijakan pendidikan.

   Masa reformasi membawa semangat keterbukaan dan partisipasi masyarakat dalam membuat keputusan tentang pendidikan. Sekolah, pengajar, orang tua, dan masyarakat mulai terlibat dalam proses pengambilan kebijakan. Hal ini dapat dilihat dari kehadiran komite sekolah serta meningkatnya transparansi. Namun, masalah yang timbul adalah tidak semua pihak benar-benar siap untuk ikut berpartisipasi secara aktif. Terkadang, partisipasi ini hanya bersifat simbolis, dan kepentingan politik atau kelompok tertentu masih mempengaruhi kebijakan pendidikan.

3. Perubahan kurikulum dan sistem pendidikan..

   Kurikulum di Indonesia sering mengalami perubahan selama era reformasi, mulai dari Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK), Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP), hingga Kurikulum 2013. Perubahan ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan menyesuaikan dengan perkembangan zaman. Namun, tantangan utama adalah perubahan yang terlalu sering membuat para guru dan siswa kesulitan untuk beradaptasi. Selain itu, tidak semua sekolah memiliki tingkat kesiapan yang sama dalam mengimplementasikan kurikulum baru, baik dari segi pelatihan guru maupun fasilitas yang mendukung.

4. Tantangan dalam era reformasi.

   Walaupun telah ada banyak kemajuan, pendidikan di era reformasi masih dihadapkan pada berbagai tantangan signifikan. Beberapa di antaranya termasuk kesenjangan dalam akses pendidikan, kualitas guru yang bervariasi, komersialisasi pendidikan, serta dampak globalisasi dan teknologi. Selain itu, terdapat pula tantangan untuk mempertahankan nilai-nilai karakter di tengah perkembangan zaman yang pesat. Pendidikan kini dituntut untuk tidak hanya fokus pada kecerdasan akademis tetapi juga dalam membentuk karakter dan moral siswa.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa dalam masa reformasi, kebijakan pendidikan menunjukkan usaha untuk menyempurnakan sistem pendidikan agar lebih adil dan demokratis. Meski demikian, berbagai regulasi yang dibuat masih mengalami hambatan dalam pelaksanaannya, sehingga perlu dilakukan evaluasi dan perbaikan secara terus-menerus agar sasaran pendidikan nasional benar-benar dapat tercapai.

Analisis Dinamika Kekuasaan dalam Pendidikan

Analisis tentang dinamika kekuasaan dalam pendidikan di Indonesia pada dasarnya menunjukkan bahwa aspek, konten, dan tujuan pendidikan selalu dipengaruhi oleh pihak yang memiliki kekuasaan dan cara pelaksanaan kekuasaan tersebut. Pendidikan tidak hanya merupakan proses belajar, tetapi juga berfungsi sebagai alat politik untuk membentuk masyarakat sesuai dengan ideologi dan kepentingan negara pada waktu tertentu.

Perbandingan kebijakan pendidikan antar era, ketika melihat perbandingan antar periode, kebijakan pendidikan di Indonesia mengalami transformasi yang signifikan. Di masa kolonial, pendidikan memiliki sifat yang eksklusif dan hanya diperuntukkan bagi kepentingan penjajah, seperti menghasilkan tenaga administrasi. Setelah meraih kemerdekaan, terutama di era Soekarno, pendidikan diarahkan untuk mengembangkan identitas nasional dan semangat kebangsaan. Pendidikan digunakan sebagai sarana untuk memperkuat ideologi negara dan persatuan bangsa.

Memasuki era Soeharto, sistem pendidikan menjadi lebih terintegrasi dan dikelola oleh pemerintah. Kurikulum, sumber belajar, serta pola pikir siswa diarahkan untuk sesuai dengan kepentingan negara. Tujuan utama adalah menjaga stabilitas politik, sehingga pendidikan dimanfaatkan sebagai sarana untuk mengontrol masyarakat. Sementara itu, di masa reformasi, kebijakan pendidikan mulai beralih ke model desentralisasi dan demokratisasi. Otonomi daerah meningkat, dan masyarakat mulai dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan. Namun, perubahan ini juga membawa tantangan baru, seperti ketidakmerataan dalam kualitas pendidikan dan kebijakan yang sering kali tidak konsisten (Mujianto et al., 2025).

Pergeseran pola kekuasaan (dari otoriter ke demokratis), Pergeseran paling signifikan dalam struktur kekuasaan pendidikan adalah transisi dari sistem otoriter ke demokratis. Pada era Orde Baru, kekuasaan terpusat (*top-down*), di mana pemerintah mengendalikan hampir semua hal terkait pendidikan tanpa banyak kesempatan untuk kritik atau partisipasi dari masyarakat. Guru dan siswa lebih berfungsi sebagai pelaksana dari kebijakan yang ada. Setelah reformasi, hal ini beralih menjadi lebih terbuka (*bottom-up*). Sekolah, guru, dan masyarakat diberikan kesempatan untuk menyampaikan pendapat dan berperan aktif dalam pengambilan keputusan. Hubungan antara pemerintah dan masyarakat menjadi lebih interaktif. Namun, pergeseran ini tidak sepenuhnya ideal. Dalam beberapa situasi, masih muncul praktik lama, seperti intervensi politik dalam sektor pendidikan atau kebijakan yang kurang transparan. Dengan kata lain, meskipun sistemnya sudah lebih demokratis, dalam pelaksanaannya masih terdapat "transisi" yang belum sepenuhnya terpenuhi dari pola lama ke pola yang baru (Nasyirudin, 2025).

Konsistensi dan perubahan tujuan pendidikan, secara keseluruhan, tujuan pendidikan di Indonesia tetap memiliki benang merah yang sama, yakni mencerdaskan masyarakat dan membentuk karakter individu, seperti yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945. Namun, dalam praktiknya, tujuan ini seringkali disesuaikan dengan kepentingan politik dan kondisi terkini. Di awal kemerdekaan, fokus pendidikan lebih pada pembentukan identitas bangsa. Pada masa Orde Baru, tujuan pendidikan diarahkan untuk menciptakan stabilitas dan memperkuat pertumbuhan ekonomi. Sementara di era reformasi, tujuan pendidikan berkembang menjadi lebih inklusif, mencakup pengembangan potensi individu, keterampilan global, serta nilai-nilai demokratis. Meskipun demikian, tantangan utama adalah mempertahankan konsistensi tujuan pendidikan di tengah seringnya perubahan kebijakan. Perubahan kurikulum, sistem evaluasi, dan arah kebijakan menyebabkan tujuan pendidikan sering kali terlihat tidak stabil dalam praktiknya. Hal ini mengakibatkan kebingungan di kalangan pendidik dan siswa (Ramadhan & Hindun, 2023).

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa analisis dinamika kekuasaan dalam pendidikan di Indonesia menunjukkan bahwa sektor pendidikan selalu terpengaruh oleh politik dan kekuasaan. Dari sistem yang bersifat otoriter hingga yang lebih demokratis, dari kebijakan sentral hingga desentralisasi, semua ini membawa hasil positif serta tantangan tersendiri. Oleh karena itu, hal terpenting ke depan adalah menjaga keseimbangan antara kepentingan politik, kebutuhan masyarakat, dan tujuan pendidikan nasional agar pendidikan benar-benar berfungsi sebagai alat untuk kemajuan bangsa, bukan hanya sebagai sarana kekuasaan.

Dampak Politik Terhadap Pendidikan di Indonesia

Dampak politik terhadap pendidikan di Indonesia sangat signifikan sebab setiap kebijakan pendidikan sejatinya berasal dari keputusan politik. Arah kebijakan ini kemudian berpengaruh pada standar pendidikan, pemerataan akses, serta peran guru dan siswa dalam proses pembelajaran. Oleh sebab itu, untuk memahami pendidikan di Indonesia, perlu mempertimbangkan dinamika politik yang melatarbelakanginya (Iswahyudi et al., 2023).

Pengaruh terhadap kualitas pendidikan, kualitas pendidikan sangat terkait dengan stabilitas dan arah kebijakan politik. Ketika kebijakan pendidikan dibuat dengan konsistensi dan kesinambungan, kualitas pendidikan biasanya akan membaik karena sekolah, guru, dan siswa memiliki tujuan yang jelas. Namun, dalam praktiknya di Indonesia, perubahan kebijakan yang sering terjadi seperti penggantian kurikulum atau sistem evaluasi mendatangkan ketidakstabilan. Guru harus sering menyesuaikan diri, sementara siswa menjadi "objek percobaan" dari sistem yang belum matang. Selain itu, kebijakan politik juga menentukan cara pengalokasian anggaran pendidikan. Sesuai dengan UUD 1945, anggaran pendidikan diharuskan minimal 20% dari APBN/APBD. Namun, permasalahannya bukan hanya jumlah anggaran, melainkan juga distribusi dan efektivitas pemanfaatannya. Jika pengelolaan tidak dilakukan dengan baik, maka kualitas pendidikan tidak akan naik secara signifikan meskipun anggarannya besar. Dengan kata lain, kemajuan kualitas pendidikan sangat terbantu oleh cara kebijakan politik diimplementasikan menjadi program yang realistis dan tepat sasaran (Ali, 2017).

Ketimpangan akses pendidikan **p**olitik juga memberikan pengaruh besar terhadap pemerataan akses pendidikan. Kebijakan desentralisasi yang diterapkan selepas reformasi memang memberikan kewenangan kepada daerah, namun juga menimbulkan ketimpangan antar wilayah. Daerah yang kaya sumber daya dapat meningkatkan pendidikan dengan baik, sementara daerah yang kekurangan cenderung tertinggal. Ketimpangan ini terlihat dalam perbedaan sarana sekolah, kualitas tenaga pengajar, hingga akses

terhadap teknologi. Sekolah di kota umumnya dilengkapi dengan fasilitas yang lebih baik dibandingkan sekolah di daerah terpencil. Di samping itu, faktor ekonomi memiliki dampak yang besar. Walaupun pemerintah telah meluncurkan berbagai program bantuan, masih ada kelompok masyarakat yang kesulitan untuk mengakses pendidikan berkualitas karena biaya-biaya tambahan seperti transportasi, perlengkapan sekolah, dan kebutuhan lainnya. Di sisi lain, kebijakan politik yang tidak merata juga dapat memperkuat komersialisasi pendidikan. Sekolah-sekolah unggulan atau swasta yang berkualitas tinggi sering kali hanya dapat dijangkau oleh kelompok tertentu, sehingga memperburuk kesenjangan sosial dalam pendidikan (Ramadhani et al., 2025).

Perubahan peran guru dan peserta didik, dinamika politik juga mengubah peran guru dan siswa dalam sistem pendidikan. Pada masa pemerintahan yang cenderung otoriter, seperti pada era Soeharto, guru berfungsi sebagai penyampai informasi yang harus mematuhi kebijakan secara ketat, sementara siswa lebih bersifat pasif dan hanya menerima. Pendidikan lebih diutamakan pada kepatuhan dan keseragaman. Namun, di era reformasi, peran ini mulai mengalami perubahan. Guru diharapkan menjadi fasilitator yang mampu mendorong siswa untuk berpikir kritis, kreatif, dan mandiri. Siswa tidak lagi hanya menerima informasi, tetapi juga berpartisipasi aktif dalam proses belajar. Perubahan ini sejalan dengan semangat demokrasi dalam pendidikan. Meski begitu, perubahan peran ini tidak selalu berjalan lancar. Banyak guru yang masih kesulitan beradaptasi dengan metode pengajaran yang baru karena minimnya pelatihan atau dukungan. Di sisi lain, tidak semua siswa siap untuk belajar secara mandiri, terutama jika lingkungan belajar tidak mendukung. Hal ini menunjukkan bahwa perubahan peran tidak hanya dapat terjadi lewat kebijakan, tetapi juga memerlukan kesiapan sumber daya manusia (Loppies, 2023).

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa dunia politik memberikan dampak yang signifikan terhadap pendidikan di Indonesia, baik dalam aspek kualitas, pemerataan akses, maupun peran para pelaku di bidang pendidikan. Kebijakan politik yang efektif dapat memperbaiki mutu pendidikan dan membangun sistem yang lebih adil. Namun, jika tidak ditangani dengan baik dan tepat waktu, hal ini dapat menyebabkan ketidaksetaraan dan ketidakstabilan. Oleh karena itu, dibutuhkan kebijakan pendidikan yang tidak hanya memiliki unsur politik, tetapi juga fokus pada kebutuhan riil masyarakat dan keberlanjutan dalam jangka panjang.

KESIMPULAN

Politik pendidikan menunjukkan bahwa sistem pendidikan tidak pernah bersifat netral karena selalu dipengaruhi oleh kekuasaan serta kepentingan politik, sosial, ekonomi, dan budaya. Pendidikan memiliki hubungan timbal balik dengan kekuasaan: di satu sisi dapat dimanfaatkan sebagai alat untuk mempertahankan dan menyebarkan ideologi para penguasa, namun di sisi lain juga berpotensi menjadi sarana pembebasan yang dapat meningkatkan kesadaran kritis masyarakat.

Pendidikan pada masa kolonial di Indonesia tidak dirancang untuk mendidik masyarakat secara menyeluruh, tetapi lebih untuk memenuhi kepentingan penguasa penjajah dengan menyediakan tenaga kerja yang terampil, namun dalam posisi yang terbatas dan patuh. Sistem pendidikan yang ada bersifat diskriminatif serta terpisah berdasarkan ras dan kelas sosial, memperkuat ketidakadilan dan mempertahankan dominasi kolonial. Selain itu, pendidikan digunakan sebagai sarana pengendalian sosial dan ideologi untuk menyebarkan nilai-nilai yang mendukung kekuasaan penjajah dan membatasi pemikiran kritis.

Pada periode Orde Lama (1945–1966), sektor pendidikan di Indonesia mengalami transformasi signifikan dari sistem kolonial ke sistem nasional yang berlandaskan Pancasila dan UUD 1945. Tujuannya tidak hanya untuk mencerdaskan masyarakat, tetapi juga untuk membentuk identitas dan karakter bangsa. Pendidikan memiliki peran yang krusial dalam menanamkan nilai-nilai nasionalisme, persatuan, dan semangat untuk mempertahankan kemerdekaan. Namun, dengan perubahan situasi politik, terutama selama era Demokrasi Terpimpin, pendidikan semakin terpengaruh oleh ideologi dan kepentingan politik, bahkan dijadikan alat indoktrinasi melalui kurikulum yang dipenuhi muatan politik.

Pada masa Orde Baru (1966–1998), sistem pendidikan di Indonesia diatur secara sangat terpusat dengan tujuan untuk menciptakan keseragaman, mendukung stabilitas politik, dan mendukung pembangunan nasional. Kurikulum tidak hanya berperan sebagai panduan untuk belajar, tetapi juga berfungsi sebagai alat bagi negara untuk menanamkan nilai-nilai ideologis seperti Pancasila melalui program PMP dan P4, sehingga proses pendidikan menjadi lebih satu arah dan membatasi kemampuan berpikir

kritis siswa.

Dalam masa reformasi, kebijakan pendidikan menunjukkan usaha untuk menyempurnakan sistem pendidikan agar lebih adil dan demokratis. Meski demikian, berbagai regulasi yang dibuat masih mengalami hambatan dalam pelaksanaannya, sehingga perlu dilakukan evaluasi dan perbaikan secara terus-menerus agar sasaran pendidikan nasional benar-benar dapat tercapai.

Analisis dinamika kekuasaan dalam pendidikan di Indonesia menunjukkan bahwa sektor pendidikan selalu terpengaruh oleh politik dan kekuasaan. Dari sistem yang bersifat otoriter hingga yang lebih demokratis, dari kebijakan sentral hingga desentralisasi, semua ini membawa hasil positif serta tantangan tersendiri. Oleh karena itu, hal terpenting ke depan adalah menjaga keseimbangan antara kepentingan politik, kebutuhan masyarakat, dan tujuan pendidikan nasional agar pendidikan benar-benar berfungsi sebagai alat untuk kemajuan bangsa, bukan hanya sebagai sarana kekuasaan.

Dunia politik memberikan dampak yang signifikan terhadap pendidikan di Indonesia, baik dalam aspek kualitas, pemerataan akses, maupun peran para pelaku di bidang pendidikan. Kebijakan politik yang efektif dapat memperbaiki mutu pendidikan dan membangun sistem yang lebih adil. Namun, jika tidak ditangani dengan baik dan tepat waktu, hal ini dapat menyebabkan ketidaksetaraan dan ketidakstabilan. Oleh karena itu, dibutuhkan kebijakan pendidikan yang tidak hanya memiliki unsur politik, tetapi juga fokus pada kebutuhan riil masyarakat dan keberlanjutan dalam jangka panjang.

DAFTAR PUSTAKA

Addina, N., & Hanif, M. (2025). Pendidikan dan Kekuasaan: Antara Pembebasan dan Dominasi Perspektif Michel Foucault, Pierre Bourdieu, dan Paulo Freire. *Jurnal Inovasi Penelitian Ilmu Pendidikan Indonesia*, 196–210.

Alam, L. (2020). Kontestasi Kebijakan Pendidikan Islam Di Era Orde Baru Dan Reformasi. *Ruhama: Islamic Education Journal*, *3*(2).

Ali, M. (2017). *Kebijakan pendidikan menengah dalam perspektif governance di indonesia*. Universitas Brawijaya Press.

anisa Al Maulani, S., & Khasanah, N. (2025). Peran pendidikan dalam pembentukan identitas masyarakat modern. *Jurnal Pendidikan Agama Islam*, *2*(2).

Djuyandi, Y. (2023). *Pengantar ilmu politik*. PT. RajaGrafindo Persada-Rajawali Pers.

Duryat, D. R. H. M. (2022). *Analisis kebijakan pendidikan; Teori dan praktiknya di Indonesia*. Penerbit K-Media.

Famella, S., Susardi, S., Sitohang, R. Z., Budiarti, I. A., Haris, M., Yusmita, Y., Adinar, A., Susanti, L., Aisyah, S., & Alfazli, M. A. (2024). *Kajian pengelolaan sistem pendidikan*. CV. Gita Lentera.

Fauzi, F., Lensa, R., Yusdiana, E., Safitri, A., Nusraini, I., Novita, W., Isnaini, F., Jufni, M., Yusuf, M., & Sartika, D. (2024). *Historiografi Undang–Undang Pendidikan Di Indonesia: Sejak Zaman Kolonial Hingga Zaman Reformasi*. Sada Kurnia Pustaka.

Hidayat, F. (2018). Pertumbuhan Ideologi Pendidikan di Era Reformasi (Kajian Terhadap Ideologi Pendidikan di Kuttab Al Fatih Purwokerto). *LITERASI (Jurnal Ilmu Pendidikan)*, *8*(2), 85–98.

Idris, M., & Tolla, I. (2024). Evolusi sistem pendidikan di Indonesia: Sejarah dan perkembangan pendidikan di Indonesia. *Jurnal Kewarganegaraan*, *8*(2), 1494–1505.

Iswahyudi, M. S., Irianto, I., Salong, A., Nurhasanah, N., Leuwol, F. S., Januaripin, M., & Harefa, E. (2023). *Kebijakan dan inovasi pendidikan: Arah pendidikan di masa depan*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.

Jannah, N. (2019). Realitas pesantren dan kebijakan pendidikan Islam dalam perspektif hegemoni Antonio Gramsci. *Journal of Islamic Education Research*, *1*(01), 1–21.

Khairudin, A., & Jayanti, D. R. (2026). Kurikulum Pendidikan Islam Dari 1975-Kurikulum Merdeka. *Al-Mudabbir: Journal of Islamic Education Management*, *2*(1), 248–257.

Lathifah, H., Frinaldi, A., Magriasti, L., & Naldi, H. (2024). Transformasi kebijakan desentralisasi di Indonesia dan implikasinya terhadap stabilitas pemerintahan daerah di era globalisasi. *Professional: Jurnal Komunikasi Dan Administrasi Publik*, *11*(2), 577–584.

Loppies, M. (2023). Pendidikan Zaman Orde Baru: Upaya Melanggengkan Kekuasaan Soeharto. *Phinisi Integration Review*, *6*(2), 237–245.

Mujianto, G., Setiawan, A., & Inderasari, E. (2025). Analisis pragmatisme kekuasaan interaksi guru-siswa dalam pembelajaran bahasa Indonesia. *Fon: Jurnal Pendidikan Bahasa Dan Sastra Indonesia*, *21*(1), 236–252.

Nasyirudin, M. (2025). *Sosiologi Pemerintahan*. CV Eureka Media Aksara.

Pamungkas, J. (2025). *Politik Etis dan Perubahan Sosial: Pendidikan dan Pembangunan sebagai Instrumen Kolonialisme dan Penindasan Rakyat Hindia Belanda*. Intrans Publishing.

Prihatin, E., Kadarsah, D., & IZFS, R. D. (2025). *Kebijakan Pendidikan Nasional: Transformasi Digital untuk Sistem yang Inklusif*. Indonesia Emas Group.

Ramadhan, E. H., & Hindun, H. (2023). Penerapan model pembelajaran berbasis proyek untuk membantu siswa berpikir kreatif. *Protasis: Jurnal Bahasa, Sastra, Budaya, Dan Pengajarannya*, *2*(2), 43–54.

Ramadhani, A., Laura, P., Diangera, T. N. A., Wahyudi, R., Pratiwi, R. S., Saputra, F. E. D., Sujatnico, S., Maharani, F. T. N., Apriliani, D., & Mentari, A. (2025). Dinamika dan Ketimpangan Pembangunan dalam Pelaksanaan Asas Desentralisasi Antar Daerah di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Manajemen*, *3*(12), 301–310.

Rasyid, S., & Fahmi, M. (2025). Tiga Pelopor Bangkitnya Nasionalisme Di Awal Pergerakan Indonesia. Budi Utomo, Sarekat Islam, Dan Indische Partij. *Carita: Jurnal Sejarah Dan Budaya*, *3*(2), 124–143.

Ridwan, I., & Sumirat, I. R. (2021). Kebijakan desentralisasi pendidikan di era otonomi daerah. *Jurnal Pendidikan Karakter JAWARA (Jujur, Adil, Wibawa, Amanah, Religius, Akuntabel)*, *7*(1).

Rosyada, D. (2017). *Madrasah dan profesionalisme guru dalam arus dinamika pendidikan Islam di era otonomi daerah*. Kencana.

Safei, H., & Hudaidah, H. (2020). Sistem pendidikan umum pada masa Orde Baru (1968-1998). *Jurnal Humanitas*, *7*(1), 1–15.

Solichin, M. (2015). Implementasi kebijakan pendidikan dan peran birokrasi. *Religi: Jurnal Studi Islam*, *6*(2), 148–178.

Sultani, Z. I. M., & Kristanti, Y. P. (2020). Perkembangan dan pelaksanaan pendidikan di zaman kolonial Belanda di Indonesia abad 19-20. *Jurnal Artefak*, *7*(2), 91–106.

Tarigan, R. S. (2024). *Reformasi hukum tata negara: Menuju keadilan dan keseimbangan*. Ruang Berkarya.

Yuningsih, H. (2015). Kebijakan Pendidikan Islam Masa Orde Baru. *Tasyri'*, *22*(2), 175–194.